

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan dan penganggaran harus dibuat sebelum melakukan pembangunan karena dengan adanya perencanaan dan penganggaran, usaha-usaha pemerintah akan lebih banyak berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan sehingga memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perencanaan dan penganggaran terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan untuk melakukan kegiatan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dokumen yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.

Dalam perencanaan dan penganggaran, RKPD berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggara urusan wajib daerah

serta untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah dan mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA OPD. Jika RKPD ini tidak diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintah daerah maka pelaksanaan kegiatannya tidak akan berjalan dengan baik karena acuan penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengenai sasaran pembangunan daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah. Sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan setiap daerah. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Untuk melaksanakan pembangunan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam kaitannya dengan faktor dana ada suatu dana yang sangat penting perannya dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD, karena dana itu berasal dari

masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan didaerahnya.

Karena kondisi ekonomi Sumatera Barat yang terus meningkat setiap tahunnya, diharapkan daerah ini semakin maju dan pembangunan dapat meningkat, untuk itu diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul “PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT” sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan tentang perencanaan dan penganggaran pada latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dalam perencanaan dan penganggaran serta bagaimana upaya/solusinya pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, penulis telah mampu dan

terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang di peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Program Diploma III dengan tujuan, yaitu :

1. Mengetahui proses tahapan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui masalah atau kendala yang terjadi dalam perencanaan dan penganggaran serta mencari solusinya pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk mempersiapkan diri sebagai Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
 - b. Membantu penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapat untuk persiapan pengimplementasiannya di OPD yang sesuai nantinya di dunia kerja.
 - c. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai proses yang terkait dalam perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Universitas

- a. Untuk menjalin kerjasama serta hubungan baik antara kependidikan dengan instansi/perusahaan.
- b. Untuk dapat meningkatkan kualitas kelulusan melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga dikenal oleh dunia kerja.

3. Bagi Tempat Magang

- a. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.
- b. Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
- c. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan universitas yang bersangkutan.

1.5 Cara Pencapaian Tujuan

Adapun yang penulis lakukan agar tujuan magang dapat tercapai, penulis melakukan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan magang, yakni :

1. Mencari referensi yang berkaitan dengan judul laporan magang sebelum berlangsungnya magang.
2. Membaca teori-teori yang berkaitan dengan magang sebelum memulai magang.
3. Sosialisasi dengan lingkungan tempat magang.
4. Mengetahui gambaran umum dan profil lembaga (OPD).
5. Perencanaan hingga pelaksanaan anggaran di OPD.

6. Mengetahui aturan-aturan baku tentang pelaksanaan anggaran hingga koreksi terhadap pelaksanaannya di OPD yang bersangkutan.
7. Mengetahui instrumen-instrumen yang menjadi bagian terkait OPD, beserta tupoksinya.

1.6 Tempat, Waktu, Dan Kegiatan Magang

Magang adalah syarat utama untuk melalui proses pendidikan program Diploma III Universitas Andalas. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk melakukan magang disuatu perusahaan/instansi sebelum mendapatkan gelarnya. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, dalam kegiatan magang, kita memiliki kesempatan mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang professional.

Penulis melakukan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang. Magang berlangsung selama 40 hari.

1.7 Sistemika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis muat dalam laporan magang ini, penulis bagi atas 5 (lima) BAB saling berkaitan/berhubungan satu sama lainnya, Sistematika laporan magang, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama menjelaskan tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan/magang, langkah-

langkah atau cara pencapaian tujuan, tempat, waktu dan kegiatan magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai pengertian perencanaan dan penganggaran, dan pandangan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah pada bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah terkait OPD sesuai aturan yang berlaku.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, secara umum, visi, misi, serta srtuktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat berisi hasil yang telah penulis peroleh atau dapatkan selama aktivitas magang yang penulis jalani, atau berupa kegiatan laporan magang yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perencanaan dan penganggaran di dinas tersebut, serta permasalahan dan solusi pada perencanaan dan penganggaran.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari laporan magang yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan laporan magang dan saran-saran yang dapat

diberikan sehingga menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

